



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 262 /B.07/HK/2021**

TENTANG

PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/437/B.09/HK/2018 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pada Inspektorat Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.07/HK/2021
TANGGAL: 2021

**REKAPITULASI HASIL ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	INSPEKTUR	1	1,26	1	0	A		
	SEKRETARIS INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	1	1,034	1	0	A	2,8247	A
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	1	1,248	1	0	A		
	- Analis Layanan Umum	1	4,112	4	-3	A		
	- Analis Tata Usaha	1	5,48	5	-4	A		
	- Sekretaris	0	1,477	1	-1	A		
	- Pengadministrasi Program dan Kerjasama	2	2,296	2	0	A		
	- Pengadministrasi Umum	8	8,1	8	0	A		
	- Pengemudi	0	1	1	-1	A		
	- Analis Keuangan	2	3,36	3	-1	A		
	- Bendahara	1	1,458	1	0	A		
	- Pengelola Data	0	1,22	1	-1	A		
	KEPALA SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI	1	1,03	1	0	A		
	- Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	5	4,892	5	0	A		
	- Analis Pengawasan	0	4,448	4	-4	A		
	- Pengelola Data Temuan Pengawasan	1	1,45	1	0	A		
	- KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN	1	1,06	1	0	A		
	- Analis Perencanaan	3	6,581	7	-4	A		
	- Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	1,256	1	0	A		
	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	1	1,194	1	0	A	3,7205	A
	- JF Auditor Pertama	2	2,27	2	0	A		
	- JF Auditor Muda	9	8,536	9	0	A		
	- JF Auditor Madya	5	5,468	5	0	A		
	- JF Auditor Utama	0	0,046	0	0	E		
	JF Pengawasan Penyelenggaraan - Urusan Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Pertama	3	3,831	4	-1	A		
	JF Pengawasan Penyelenggaraan - Urusan Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Muda	4	4,326	4	0	A		
	JF Pengawasan Penyelenggaraan - Urusan Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Madya	4	4,093	4	0	A		
	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	1	1,194	1	0	A	3,3254	A
	- JF Auditor Penyelia	1	1,023	1	0	A		
	- JF Auditor Pertama	1	1,465	1	0	A		
	- JF Auditor Muda	9	9,493	9	0	A		
	- JF Auditor Madya	5	4,518	5	0	A		
	- JF Auditor Utama	0	0,045	0	0	E		
	JF Pengawasan Penyelenggaraan - Urusan Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Pertama	2	4,371	4	-2	A		

JF Pengawasan Penyelenggaraan - Urusan Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Muda	3	3,078	3	0	A		
JF Pengawasan Penyelenggaraan - Urusan Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Madya	5	4,741	5	0	A		
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	1	1,194	1	0	A	2,9939	A
- JF Auditor Penyelia	0	0	0	0	E		
- JF Auditor Pertama	0	2,409	2	-2	A		
- JF Auditor Muda	8	7,907	8	0	A		
- JF Auditor Madya	5	4,523	5	0	A		
- JF Auditor Utama	0	0,08	0	0	E		
JF Pengawasan Penyelenggaraan - Urusan Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Pertama	1	1,498	1	0	A		
JF Pengawasan Penyelenggaraan - Urusan Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Muda	6	5,741	6	0	A		
JF Pengawasan Penyelenggaraan - Urusan Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Madya	4	3,594	4	0	A		
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	1	1,194	1	0	A	3,3026	A
- JF Auditor Penyelia	2	2,434	2	0	A		
- JF Auditor Pertama	0	2,309	2	-2	A		
- JF Auditor Muda	6	6,431	6	0	A		
- JF Auditor Madya	5	4,734	5	0	A		
- JF Auditor Utama	0	0,045	0	0	E		
JF Pengawasan Penyelenggaraan - Urusan Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Pertama	3	3,58	4	-1	A		
JF Pengawasan Penyelenggaraan - Urusan Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Muda	6	5,75	6	0	A		
JF Pengawasan Penyelenggaraan - Urusan Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Madya	3	3,247	3	0	A		
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH V INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	1	1,264	1	0	A	2,3718	A
- JF Auditor Penyelia	0	0,264	0	0	E		
- JF Auditor Pertama	1	3,261	3	-2	A		
- JF Auditor Muda	0	0,497	0	0	D		
- JF Auditor Madya	4	4,418	4	0	A		
- JF Auditor Utama	0	0,045	0	0	E		
JF Pengawasan Penyelenggaraan - Urusan Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Pertama	1	6,656	7	-6	A		
JF Pengawasan Penyelenggaraan - Urusan Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Muda	1	1,43	1	0	A		
JF Pengawasan Penyelenggaraan - Urusan Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Madya	4	3,511	4	0	A		
- JF Auditor Muda	0	0,284	0	0	E		
- JF Auditor Pertama	0	0,284	0	0	E		

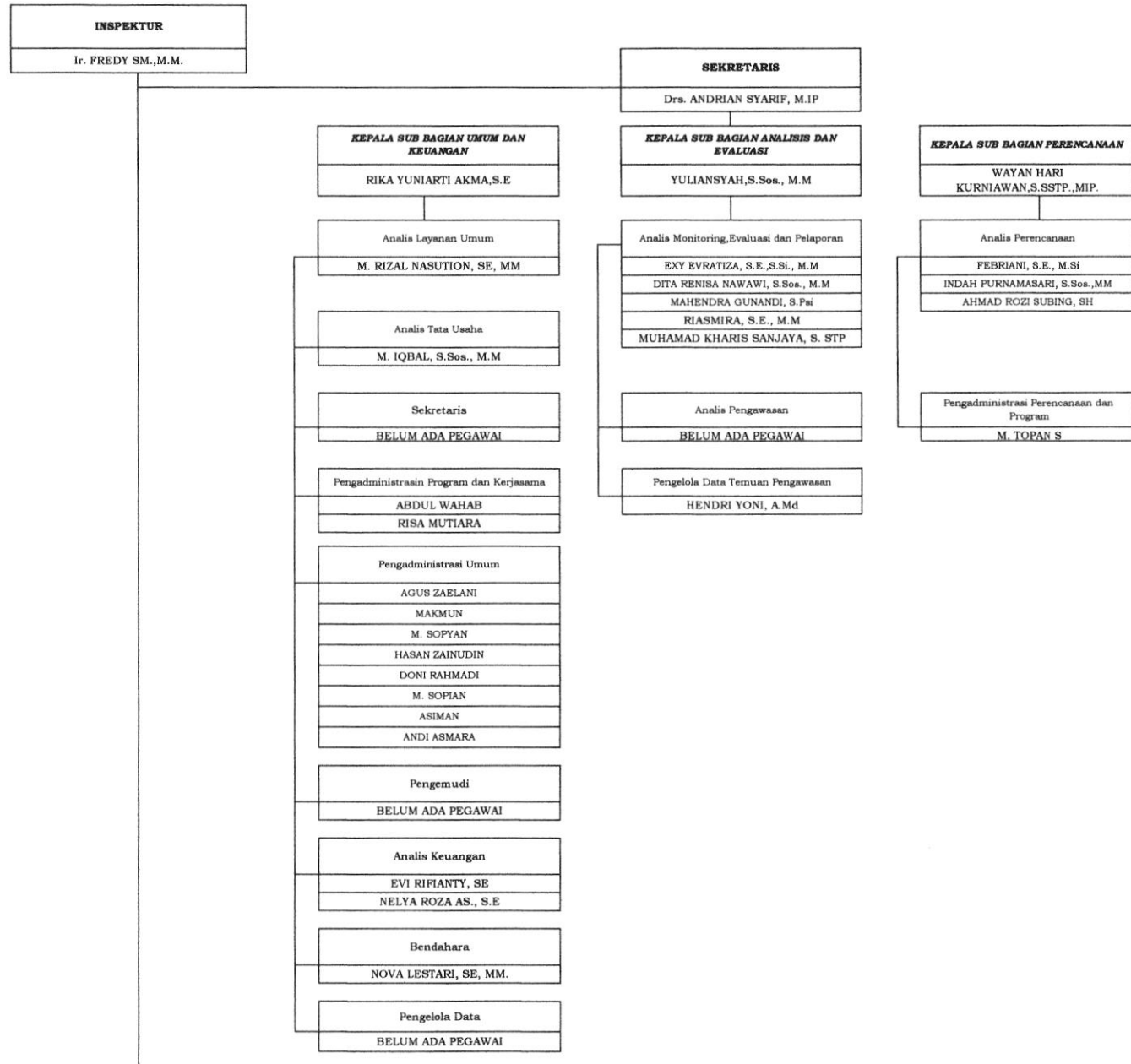
JF Pengawasan Penyelenggaraan Urusan - Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Muda	0	0,256	0	0	E		
JF Pengawasan Penyelenggaraan Urusan - Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Pertama	0	0,256	0	0	E		
JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur - Pertama	0	6,708	7	-7	A		
JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur - Muda	0	6,624	7	-7	A		
JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur - Madya	0	6,583	7	-7	A		
- JF Perencana Pertama	0	6,789	7	-7	A		
- JF Perencana Muda	0	6,936	7	-7	A		
- JF Perencana Madya	0	6,957	7	-7	A		
- JF Perencana Utama	0	0,367	0	0	E		
- JF Analis Kebijakan Pertama	0	6,765	7	-7	A		
- JF Analis Kebijakan Muda	0	6,622	7	-7	A		
- JF Analis Kebijakan Madya	0	7,081	7	-7	A		
- JF Analis Kebijakan Utama	0	0,064	0	0	E		
Jumlah	148	253.046	293	-145		3,24	A

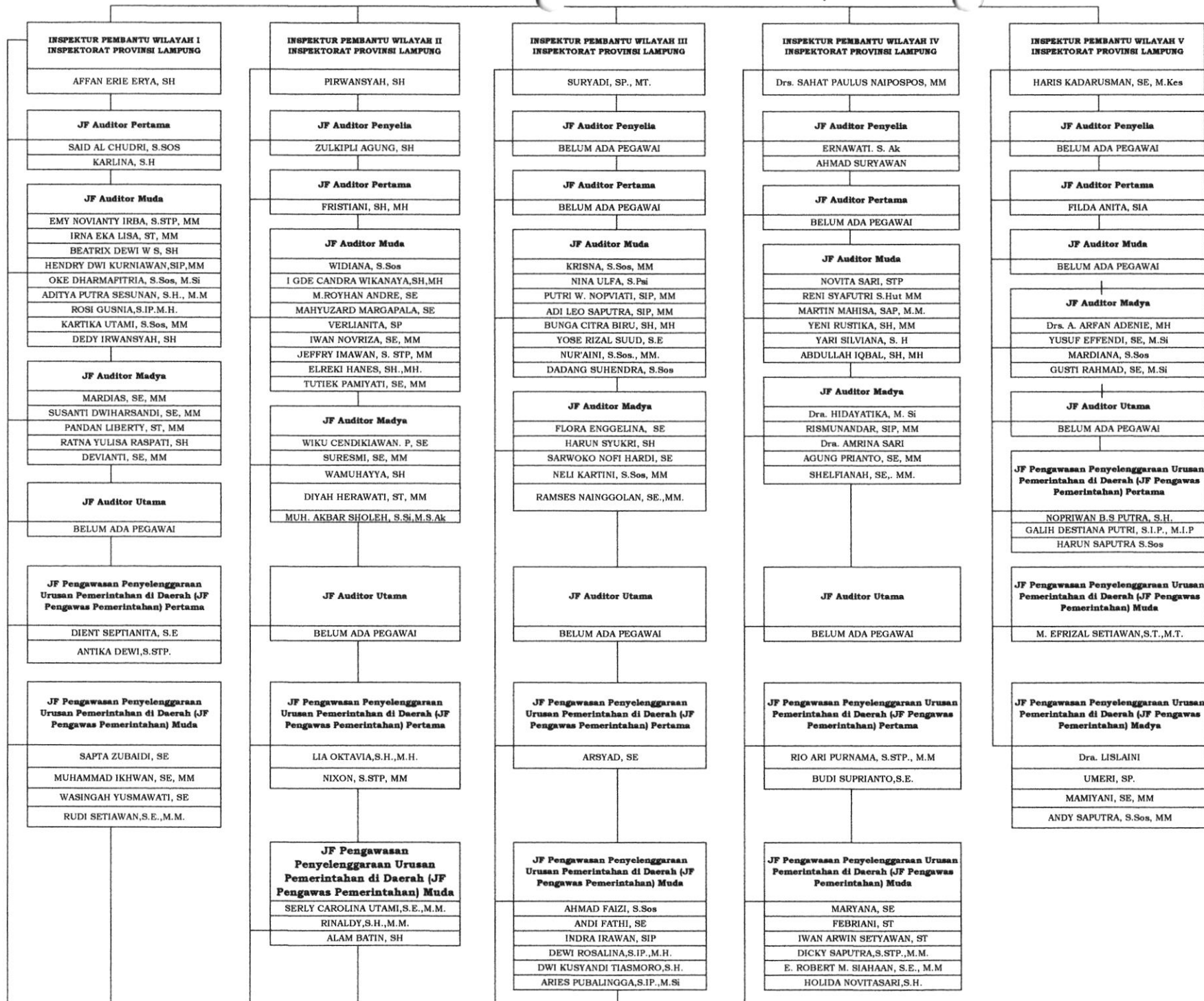
GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

**2.1 PETA JABATAN STRUKTURAL, PELAKSANA DAN FUNGSIONAL HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG**





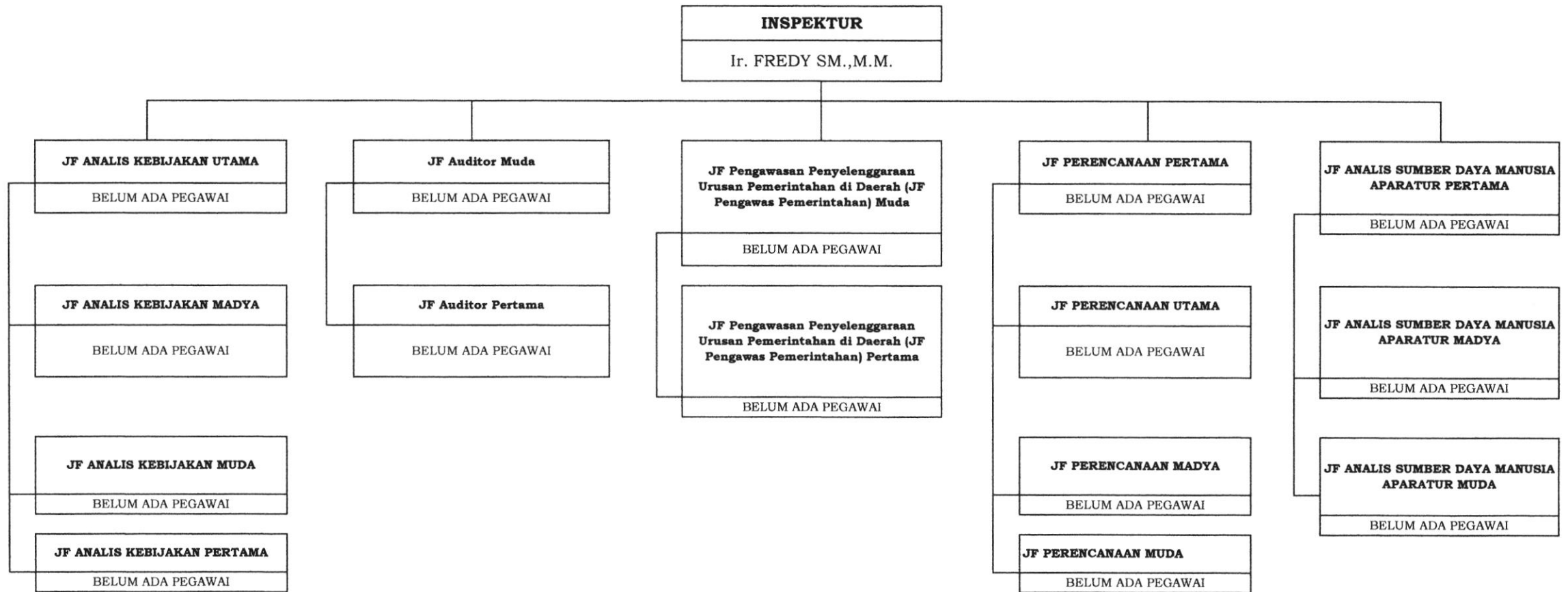
JF Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Madya	
Drs. ANTONY	
EDY KURNIA GUSTIAN, S.E., M.M.	
Drs. DAFETA ALI	
ZALLIAWATY, S.Sos	

JF Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Madya	
HERI SUSANTO, SE, M.Si	
MUHAMMAD IQBAL, ST., MT.	
IVA NOVA YALINA, SH, MH	
LUANG MISRON, SH., MP	
TRI KANCONO, SH.MM.	

JF Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Madya	
M. SJAIFOEDIN Z.H.P, ST	
Drs. HENRY ISWANDI, M.Si	
ZAINAL ABIDIN, SH	
ULIL AMRI S.Sos	

JF Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Madya	
WIRYONO, S.H., M.M.	
NEKSEN, S.Sos	
BUNAIYAH, SE	

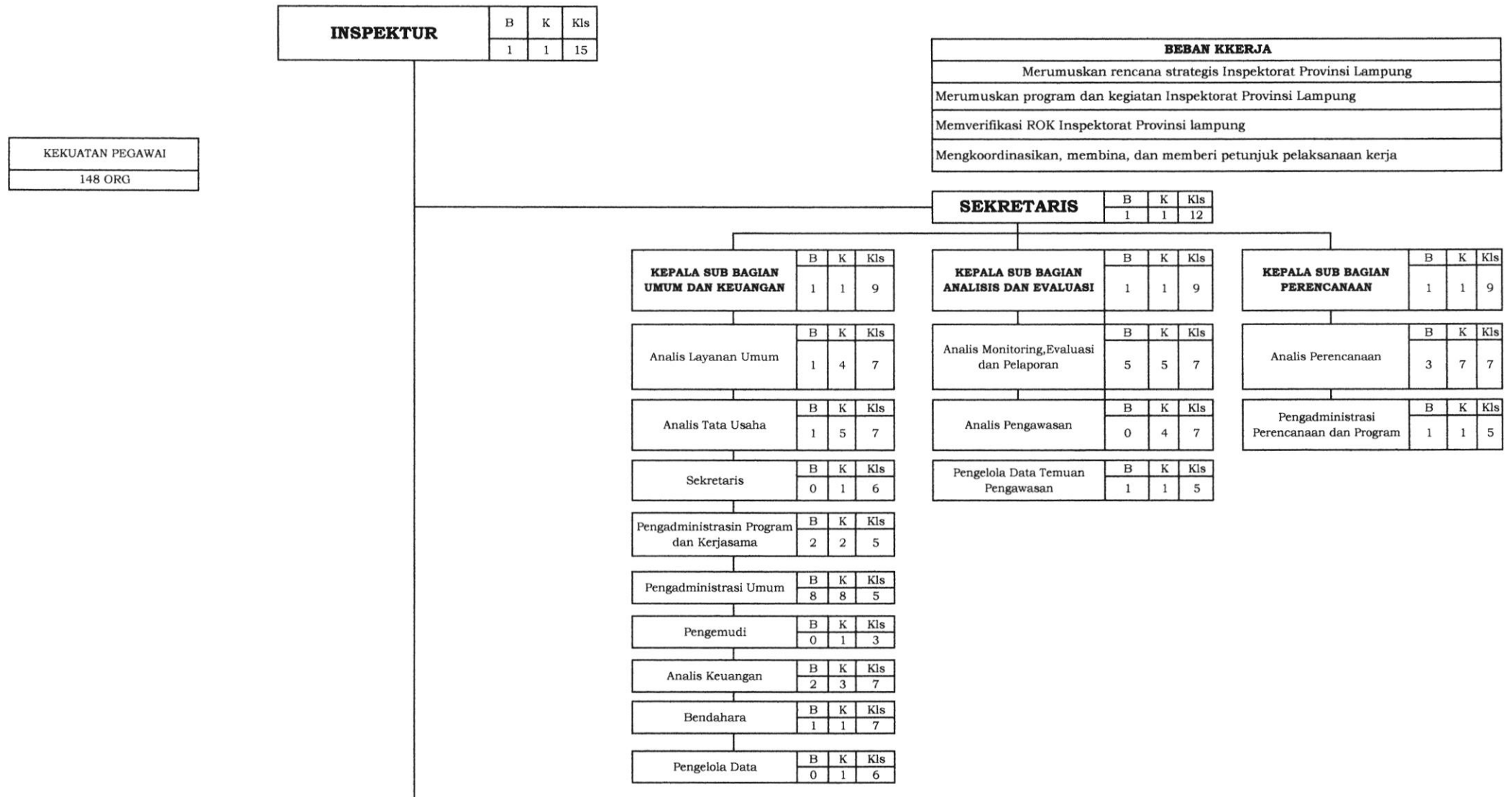
**2.2 PETA JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

3.1 PETA JABATAN STRUKTURAL, FUNGSIONAL DAN PELAKSANA DAN HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG



INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	BKs 1112
JF Auditor Pertama	BKs 228
JF Auditor Muda	BKs 999
JF Auditor Madya	BKs 5511
JF Auditor Utama	BKs 0013
JF Pengawasan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Pertama	BKs 248
JF Pengawasan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Muda	BKs 449
JF Pengawasan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Madya	BKs 4411

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	BKs 1112
JF Auditor Penyelia	BKs 118
JF Auditor Pertama	BKs 119
JF Auditor Muda	BKs 999
JF Auditor Madya	BKs 5511
JF Auditor Utama	BKs 0013
JF Pengawasan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Pertama	BKs 248
JF Pengawasan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Muda	BKs 339
JF Pengawasan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Madya	BKs 5511

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III INSPEKTORAT PROVINSI	BKs 1112
JF Auditor Penyelia	BKs 008
JF Auditor Pertama	BKs 028
JF Auditor Muda	BKs 889
JF Auditor Madya	BKs 5511
JF Auditor Utama	BKs 0013
JF Pengawasan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Pertama	BKs 118
JF Pengawasan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Muda	BKs 669
JF Pengawasan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Madya	BKs 4411

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	BKs 1112
JF Auditor Penyelia	BKs 228
JF Auditor Pertama	BKs 028
JF Auditor Muda	BKs 669
JF Auditor Madya	BKs 5511
JF Auditor Utama	BKs 0013
JF Pengawasan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Pertama	BKs 248
JF Pengawasan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Muda	BKs 669
JF Pengawasan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Madya	BKs 3311

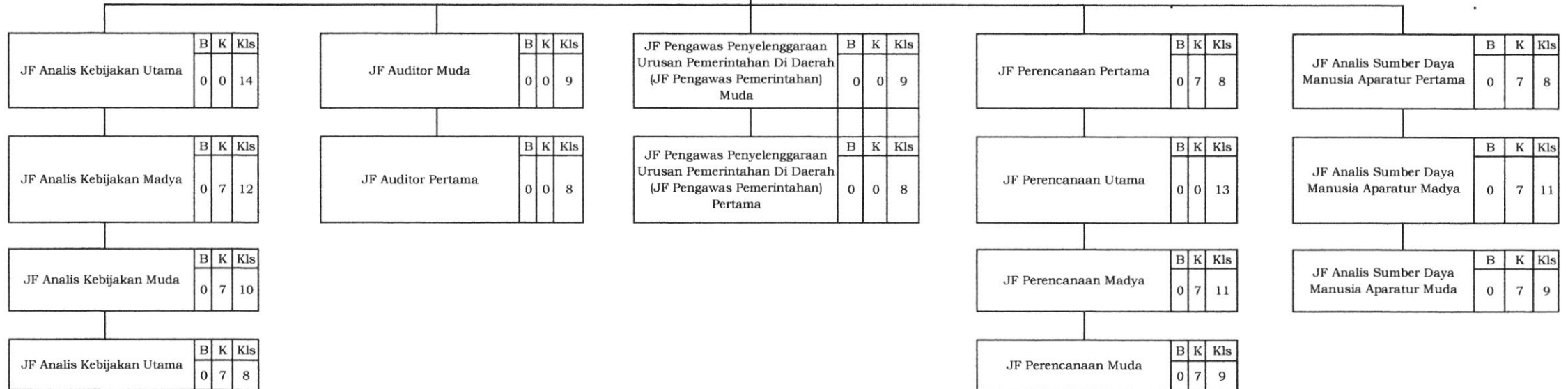
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH V INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG	BKs 1112
JF Auditor Penyelia	BKs 008
JF Auditor Pertama	BKs 138
JF Auditor Muda	BKs 009
JF Auditor Madya	BKs 4411
JF Auditor Utama	BKs 0013
JF Pengawasan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Pertama	BKs 378
JF Pengawasan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Muda	BKs 119
JF Pengawasan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Madya	BKs 4411

3.2 PETA JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

KEKUATAN PEGAWAI
-

INSPEKTUR	B	K	Kls
	1	1	15

BEBAN KKERJA
Merumuskan rencana strategis Inspektorat Provinsi Lampung
Merumuskan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Lampung
Memverifikasi ROK Inspektorat Provinsi Lampung
Mengkoordinasikan, membina, dan memberi petunjuk pelaksanaan kerja



GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI